

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laut Cina Selatan merupakan sebuah wilayah yang berada diantara beberapa perbatasan kawasan negara yang hingga saat ini masih menjadi kawasan konflik dan perebutan wilayah yang bersengketa. Terdapat banyak alasan perebutan wilayah perairan tersebut seperti Laut Cina Selatan merupakan perairan yang memiliki banyak potensial alam seperti adanya gas alam dan minyak bumi ditambah dengan perairan tersebut merupakan jalur pelayaran dan perdagangan (Djuyandi et al., 2021). Dengan luas wilayah perairan sekitar 3.000.000 km persegi, Laut Cina Selatan meliputi beberapa gugusan kepulauan diantaranya gugus kepulauan Pratas, gugus kepulauan Paracel, gugus kepulauan Spratly, dan adanya gugus karang Scarborough (Ma'rif, 2016). Selain perairan, dikawasan tersebut juga banyak terdapat pulau-pulau yang dimana kawasan ini juga menjadi perebutan antar negara yang hingga kini masih aktif dalam sengketa wilayah seperti Tiongkok, Taiwan, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Masalah ini terus menerus semakin membesar dimana Tiongkok menjadi aktor utama yang sering disalahkan banyak pihak atas permasalahan tersebut. Diperkeruh dengan ikut campurnya Amerika Serikat dengan menumpangi negara-negara yang berkonflik dengan Tiongkok dalam masalah klaim wilayah Laut Cina Selatan dengan dalih memberi bantuan dan dukungan militer.

Salah satu negara di kawasan ASEAN yang aktif dalam menyuarakan masalah perebutan sengketa wilayah yaitu Filipina, karena pemicu oleh kawasan Filipina termasuk dalam kawasan perebutan wilayah Laut Cina Selatan bersama Tiongkok sejak tahun 1955. Kawasan yang menjadikan perebutan wilayah antara Tiongkok dengan Filipina di kawasan Laut Cina Selatan yaitu mengenai Scarborough dan Kepulauan Spratly (Ocie April Ningsih, 2016).

Filipina membangun menara setinggi 27,33 meter pada tahun 1968 sebagai salah satu bentuk klaim atas wilayah yang sedang diperebutkan (Farhana, 2014). Hubungan keduanya semakin memanas ketika konflik ini mulai melibatkan militer. Tiongkok membangun pangkalan militer di kawasan Kepulauan Sparty dimana kawasan tersebut bukanlah milik Tiongkok namun masih menjadi kawasan konflik (Dancel, 2018). Kapal-kapal militer Tiongkok pun tidak segan-segan untuk melakukan penghadangan terhadap kapal-kapal nelayan milik Filipina yang sedang mencari ikan didaerah tersebut. Pada bulan Juni 2022, kapal dari pemerintah Filipina dihadang kapal Penjaga Pantai Tiongkok ketika kapal tersebut akan mengakses Second Thomas Shoal guna misi pasokan (Tomotaka, 2023). Tindakan-tindakan dari Tiongkok yang dianggap semakin membahayakan menyebabkan Filipina harus memiliki peraturan atau undang-undang khusus untuk mengurus masalah konflik dengan Tiongkok tersebut. Kebijakan-kebijakan keamanan internasional yang Filipina buat secara mandiri ataupun dengan bantuan negara maupun organisasi internasional lain seperti Amerika Serikat dan ASEAN.

Presiden-presiden yang sudah pernah menjabat di Filipina banyak yang memiliki fokus kepada masalah perebutan wilayah ini seperti pada masa awal konflik Laut Cina Selatan ini dimulai pada pemerintahan Ferdinand Marcos (1965-1986), walau dia dekat dengan negara-negara beraliran marxisme dan mencari dukungan dari para kalangan intelektual yang kritis terhadap kebijakan anti komunis pada masa pemerintahannya. Dalam konflik Laut Cina Selatan Filipina menjadi negara pertama yang saat itu melakukan kegiatan strategis di kawasan tersebut. Filipina melakukan eksplorasi di sekitar daerah Reed Bank yaitu Kepulauan Sparty yang dimana dari eksplorasi tersebut menemukan sumber gas alam pada tahun 1976 yang menyebabkan Tiongkok saat itu melakukan protes dan memberikan ultimatum kepada Filipina untuk menghentikan semua aktivitas di kawasan tersebut. Namun, tidak digubris oleh Ferdinand Marcos dan ia membuat Dekrit Presiden pada tanggal 11 Juni 1978 dimana ia memasukkan Kepulauan Sparty sebagai wilayah teritorial Filipina

(Philippines, 1978). Hal tersebut tentu membuat semakin geramnya Tiongkok kepada Filipina dan hubungan keduanya menjadi memburuk.

Joseph Estrada (1998-2001) dengan kebijakannya yaitu *Visiting Forces Agreement* (VFA) yaitu gabungan latihan militer yang dilakukan antara Filipina dan Amerika Serikat khususnya di kawasan Laut Cina Selatan guna menghalau ancaman-ancaman dari Tiongkok (Schaus, 2020). Tentu dalam perjanjian tersebut banyak memunculkan kemungkinan mengenai berlangsungnya kerjasama militer yang terjadi diantara Amerika Serikat dan Filipina. Dengan adanya kerjasama militer ini Filipina semakin memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi ancaman-ancaman dari luar terutama dari Tiongkok. Kerjasama ini membuka kembali kesempatan militer Amerika Serikat guna kembali memasuki kawasan Laut Cina Selatan yang merupakan bagian dari bentuk kerjasama militer antara kedua negara tersebut. Namun, dampaknya tentu hubungan Filipina dan Tiongkok akibat dari kerjasama ini yaitu semakin memburuk. Kita ketahui bawah Tiongkok sangat membenci segala bentuk kerjasama dan ikut campur yang dilakukan dengan Amerika Serikat.

Presiden lainnya yaitu Presiden Benigno Aquino III (2010-2016) yang selalu berusaha membawa masalah perebutan wilayah ini ke sidang-sidang internasional dan melanjutkan kebijakan-kebijakan Presiden Joseph Estrada dengan melakukan kerjasama militer dengan Amerika Serikat sehingga hubungan keduanya sangat dekat. Hubungan antar kedua negara yaitu Tiongkok dan Filipina memanas selama masa pemerintahan Presiden Benigno Aquino III ditambah dengan konflik terkait kepemilikan wilayah di kawasan Laut Cina Selatan. Pada masa pemerintahan Benigno, Filipina sangat gencar dalam membawa masalah ini kedalam mahkamah internasional salah satunya yaitu Mahkamah Arbitrase Internasional tepatnya di Den Haag pada tahun 2014. Mahkamah Arbitrase Internasional memberikan pernyataan terkait hak eksklusif di Laut Barat Filipina yang merupakan bagian dari Laut Cina Selatan adalah milik Filipina. Dalam pernyataan ini pula disebutkan bahwa pulaubuatan serta kegiatan eksplorasi minyak yang dilakukan oleh Tiongkok

dikawasan tersebut adalah tindakan yang melanggar kedaulatan Filipina. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Presiden Benigno Aquino III tentu sangat memperlihatkan sikap konfrontatifnya terhadap Tiongkok.

Lalu perbedaan dimulai di tahun 2016 dimana Presiden Rodrigo Duterte mulai menjabat yang dimana arah dari kebijakan keamanannya berbeda dari presiden-presiden yang sebelumnya pernah menjabat menyebabkan kedekatan Filipina dengan Amerika Serikat mulai memudar, Rodrigo Duterte memilih cara yang berbeda yang menarik untuk dibahas. Dibandingkan Rodrigo Duterte melanjutkan kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat ia lebih memilih untuk mendekati dan memperbaiki hubungan bilateral Filipina dengan Tiongkok. Kebijakan-kebijakan luar negeri Presiden Duterte kepada negara Tiongkok lebih mengarah kepada kerjasama bilateral diantara keduanya. Bahkan Presiden Duterte bersedia melakukan kunjungan ke Tiongkok pada tahun 2016, dan menghasilkan kerjasama antara kedua negara kembali pulih setelah perseteruan panjang mengenai sengketa wilayah di kawasan Laut Cina Selatan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang sudah tertulis diatas, maka didapatkan rumusan masalah seperti berikut **“Mengapa Rodrigo Duterte lebih kooperatif terhadap Tiongkok dalam memutuskan kebijakan keamanan Filipina dalam konflik Laut Cina Selatan?”**

## **1.3 Kerangka Pemikiran**

### **1.3.1 Teori Konstruktivisme**

Konstruktivisme menurut Karin M. Fierke muncul sebagai teori atau pendekatan baru dalam studi Hubungan Internasional, munculnya teori konstruktivisme sendiri tak lepas dari kegagalan para sarjana Hubungan Internasional dalam memprediksi atau memberikan penjelasan terhadap berakhirnya Perang Dingin atas teori Hubungan Internasional yang dominan pada kala itu. Berakhirnya Perang Dingin pada kala itu terkesan mendadak dan tidak ada ahli Hubungan Internasional yang dapat memprediksinya, menyebabkan dirasanya kegagalan kedua teori Hubungan Internasional yang kala itu menonjol serta mendorong munculnya teori baru dalam studi

Hubungan Internasional yaitu konstruktivisme (Bakry, 2017). Konstruktivisme melihat bahwa perubahan yang terjadi di dunia internasional tidak hanya karena fakta namun juga peran dari kekuatan ide. Konstruktivisme merupakan teori yang menjembatani antara kedua teori terdahulunya yaitu Teori Realisme dan Teori Liberalisme yaitu dengan membangun kerjasama namun masih menggunakan nilai-nilai dan norma. Konstruktivis meyakini perubahan yang terjadi di dunia bukan hanya fakta materil namun adanya peran yang kuat dari ide. Konstruktivisme sendiri adalah bagaimana cara atau tindakan individu atau sekelompok orang dalam mengkonstruksi, membentuk, menciptakan sesuatu serta mempresepsikan suatu masalah. Dikarenakan pada setiap individu yang berbeda maka berbeda pula dalam mempresepsikan masalah-masalah tersebut maka munculah konstruktivisme.

Konstruktivisme memiliki prinsip yang berbeda dengan neorealisme dan neoliberalisme mengenai Hubungan Internasional. Dalam konstruktivis meyakini mengenai intersubjektif seperti ide ataupun asumsi yang dibagi diantara orang-orang. Menurut Richard Price dan Christian Reus Smitdalam “critical international theory and constructivism” konstruktivis lebih mengedepankan mengenai perspektif sosiologis maupun antropologis dan menekankan pentingnya norma, peran identitas dalam membentuk kepentingan maupun tindakan, serta hubungan timbal balik dari *agents* dan *structures*. Adapun menurut Nina Tannenwald yang menyebutkan bahwa “Ide-ide adalah konstruk mental yang dipegang oleh para individu. Rangkaian keyakinan khusus, prinsip dan sikap yang memberikan orientasi bagi perilaku dan kebijakan” (Robert Jackson & Sorensen, 2014). Salah satu kunci dari konstruktivisme dalam Hubungan Internasional yaitu identitas. Identitas sendiri dibedakan menjadi dua yaitu identitas sebagai “sosial” dimana sebagai atribut ataupun karakteristik pembeda dengan yang lain melihat identitas adalah sesuatu yang terkonstruksi pada proses interaksi dengan pihak lain sehingga memberikan makna siapa “aku/kami” ataupun siapa “kamu/mereka” lebih jelasnya yaitu bagaimana suatu kelompok

ataupun individu di luar aktor memiliki pengaruh terhadap bagaimana cara aktor itu memandang dirinya. Kedua yaitu identitas sebagai “individu” dimana karakteristik yang melekat pada diri aktor sejak awal seperti identitas etnis, budaya, agama, dan sebagainya. Kedua konsep tersebut tetap sama bahwa identitas merupakan alat atau karakteristik yang ada pada diri actor guna membedakan serta mengidentifikasi dirinya terhadap pihak lain. Kontruksi identitas sendiri dapat terbentuk karena faktor internal dan eksternal.

Dalam perubahan-perubahan yang terjadi terhadap kebijakan keamanan Filipina tersebut sangat dipengaruhi oleh rekontruksi dari para pemimpin Filipina salah satunya yaitu Presiden Rodrigo Duterte mengenai Tiongkok. Kontruksi tersebut sangat dipengaruhi oleh nilai dan identitas Rodrigo Duterte dimana ia berani dalam mengambil keputusan, blak-blakan serta ofensif (BBC, 2022). Dikarenakan pengaruh identitas dirinya dari latar belakang keluarga, ideology orientasi politik, serta pendidikannya (Azwadina, Alifa and Utomo, 2020). Rodrigo banyak merubah atau mengkontruksi kebijakan dengan melihat Tiongkok lebih sebagai kawan dibandingkan lawan, ia juga memiliki beberapa pemikiran terhadap Tiongkok seperti mencapai kesepakatan bersama Tiongkok mengenai eksplorasi bersama di wilayah sengketa yaitu Laut Cina Selatan guna menjaga stabilitas kawasan tersebut dan tentunya memanfaatkan infrastruktur besar-besaran serta rencana investasi Beijing dimana semua perubahan kebijakkannya adalah berorientasi kepada kepentingan ekonomi. Alasan lain mengenai sikap kooperatif Filipina terhadap Tiongkok yaitu mengenai hubungan yang memburuk terhadap Amerika Serikat yang menyinggung kebijakan Presiden Rodrigo Duterte dalam menangani masalah narkoba di Filipina dan rasa ketidaksukaan antara Rodrigo Duterte dengan Amerika Serikat (Tamarisco, 2019).

#### **1.4 Hipotesa**

Rodrigo Duterte lebih kooperatif terhadap Tiongkok dalam memutuskan kebijakan keamanan Filipina dalam konflik Laut Cina Selatan karena:

1. Identitas dari Presiden Rodrigo Duterte yang cenderung sosialis dengan latar belakang pendidikan dan keluarga yang kental dengan politik. Sehingga identitas Duterte mempengaruhi cara mengkontruksi siapa Tiongkok untuk mendorong kerjasama keamanan dan ekonomi kedua negara.
2. Kebijakan Duterte yang lebih kooperatif terhadap Tiongkok juga dipengaruhi dengan rasa ketidaksukaan Rodrigo Duterte dengan Amerika Serikat akibat rasa anti kolonialisme ditambah dengan perubahan sikap Amerika yang cenderung bertentangan dengan pandangan Rodrigo Duterte.

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penulis dapat memberitahukan tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1.1.1 Mengetahui bagaimana kebijakan luar negeri Filipina dalam menangani masalah Laut Cina Selatan.
- 1.1.2 Mengetahui bagaimana cara Presiden Rodrigo Duterte dalam berdiplomasi dan bersikap pada masalah konflik Laut Cina Selatan.
- 1.1.3 Mengetahui mengapa Rodrigo Duterte mengambil kebijakan-kebijakan tersebut.

### **1.6 Metode Penelitian**

Penelitian mengenai “Kebijakan Keamanan Filipina Dalam Sengketa Wilayah Laut China Selatan pada Masa Presiden Rodrigo Duterte” merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial guna mendapatkan data deskriptif yang berupa kata-kata maupun gambar. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh (Moleong, 2018) yang menyatakan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menampilkan prosedur penilaian yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang sedang diamati. Dalam penelitian jenis ini penulis diharapkan untuk dapat

mengumpulkan data deskriptif sebanyak-banyaknya diambil dari literatur, jurnal penelitian, dokumen, berita dari media massa ataupun media elektronik yang relevan dengan penelitian ini, serta artikel guna dapat dituangkan dalam bentuk tulisan laporan penelitian dan uraian. Lalu menggunakan analisis deskriptif dalam menggambarkan situasi yang ada atas data dan fakta yang dihubungkan antar variable.

### **1.7 Jangkauan Penelitian**

Guna membatasi mengenai jangkauan masalah yang akan mempengaruhi hasil penelitian, maka penulis memberi batasan waktu yaitu 2016-2022 yaitu merupakan masa jabatan Presiden Rodrigo Duterte sebagai pemimpin Filipina dan menangani masalah konflik Laut Cina Selatan.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pendahuluan dari skripsi ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, hipotesa serta sistematika penulisan.

#### **BAB 2 DINAMIKA HUBUNGAN FILIPINA-TIONGKOK**

Dalam bab ini akan membahas kebijakan-kebijakan dari presiden-presiden Filipina sebelum masa Rodrigo Duterte menjabat serta bagaimana bentuk kebijakkan Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan pada masa presiden-presiden tersebut.

#### **BAB 3 PEMAHAMAN SOSIAL RODRIGO DUTERTE ATAS TIONGKOK SERTA KEBIJAKKAN FILIPINA TERHADAP POSISI TIONGKOK DI KAWASAN LAUT CINA SELATAN**

Dalam bab ini akan membahas mengenai studi kasus dari skripsi ini dengan membahas konstruksi pemikiran dari Rodrigo Duterte yang dipengaruhi oleh identitasnya serta kebijakkan Filipina dibawah kepemimpinan Rodrigo Duterte dari hasil kontruksi pemikirannya.



## **BAB 4 PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang ada.